

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur di segala aspek kehidupan, yaitu dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan peran dalam pemerataan peningkatan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan setiap warga Negara untuk berperan serta dalam pembangunan termasuk dalam pembangunan sektor usaha.

Berkaitan dengan pembangunan nasional bangsa Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi sangat berperan besar. Pemerintah menetapkan bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. Hal ini sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal tersebut, pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia dilakukan oleh tiga sektor yaitu BUMN, swasta dan koperasi. Oleh karena itu, kehidupan koperasi mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam perekonomian nasional.

Setiap usaha yang dibangun oleh warga masyarakat atau suatu badan usaha pasti memiliki tujuan, baik tujuan keluar yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun tujuan intern dari usaha itu

sendiri yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-sebesarnya serta menjaga kelanjutan kegiatan operasional dan perkembangan usaha di masa mendatang.

Sama halnya dengan bentuk usaha lainnya, koperasi juga memiliki tujuan, dan tujuan utama dari koperasi bukanlah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan manfaat yang diterima oleh anggota koperasi lebih diutamakan. Seperti yang telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 3 bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Hal ini berarti bahwa koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi sehingga koperasi harus menjaga kelanjutan kegiatan operasional dan tetap harus meningkatkan perkembangan dari usahanya.

Perkembangan usaha koperasi saat ini semakin maju. Hal ini menyebabkan tingkat persaingan antar koperasi semakin kuat. Kondisi demikian menuntut koperasi untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan bidang usahanya agar dapat bersaing dengan koperasi lain dan mempertahankan keberadaan koperasi secara berkelanjutan. Untuk kelancaran perkembangan usaha koperasi, maka dibutuhkan pengelolaan yang profesional dimana manajemen dalam suatu koperasi harus dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-anggotanya. Keterbukaan manajemen koperasi ini dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi

pertanggungjawaban pengurus koperasi. Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi.

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Dengan demikian, dilihat dari fungsi manajemen, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi (Arifin dan Tamba, 2001:107).

Laporan keuangan memiliki peranan penting bagi setiap usaha sebagai media informasi untuk mengetahui posisi keuangan dan kinerja dari perusahaan tersebut tak terkecuali koperasi. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama (pihak koperasi) dan pemakai lainnya (bank, kreditur dan kantor pajak) yang mana informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penyusunan dan pertanggungjawaban laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan pedoman yang sudah distandarkan khusus untuk koperasi dan informasi yang dapat diandalkan sangat dibutuhkan. Hal ini diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu organisasi koperasi dapat menggambarkan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja organisasi koperasi secara transparan sehingga akan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam hal penyusunan laporan keuangan, koperasi mempunyai acuan tersendiri dalam menyusun laporan keuangannya, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27. PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi ini merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi IAI terhadap pengembangan koperasi yang bekerjasama dengan Departemen Koperasi Republik Indonesia. Laporan Keuangan koperasi dalam PSAK No. 27 ini terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi telah banyak dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi:

- a. Penelitian Suciana (2006) dengan judul “Evaluasi Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dan Pengaruhnya terhadap Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan” (Studi Kasus pada Karyawan Mandiri Perum Damri Surabaya) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang wajar adalah yang didasarkan pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan sesuai prinsip tersebut ada kejelasan informasi dalam catatan-catatan pendukungnya, dan laporan keuangan yang disajikan oleh Kopkar Mandiri Perum Damri belum disajikan secara wajar. Hal ini disebabkan Kopkar Mandiri Perum Damri belum tepat dalam menerapkan PSAK No. 27.
- b. Penelitian Jamilah (2007) dengan judul “Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada Laporan Keuangan PRIMKOPAD KODIM 0829 Bangkalan” mengungkapkan bahwa PSAK No. 27 belum diterapkan

oleh PRIMKOPAD. Hal ini disebabkan belum lengkapnya laporan keuangan yang disusun oleh PRIMKOPAD untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode. PRIMKOPAD hanya menyusun dua laporan keuangan dari empat laporan yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 27.

PSAK No. 27 merupakan standar khusus akuntansi untuk koperasi. Dengan dikeluarkannya PSAK No. 27 ini diharapkan koperasi dapat menyusun laporan keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dengan memperhatikan karakteristik koperasi dan diharapkan akan lebih meningkatkan partisipasi anggota, karena anggota lebih mampu memprediksi kinerja koperasi dan sekaligus merasakan ada tidaknya transparansi dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Selain itu, standar khusus koperasi ini juga bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pembinaan koperasi dan masyarakat.

Dalam perekonomian Indonesia, koperasi diharapkan dapat berkembang sebagai badan usaha yang sehat dan kuat. Demikian pula peranan koperasi dalam perekonomian diharapkan akan semakin meningkat. Tidak kalah pentingnya adalah makin bertambahnya dampak manfaat koperasi terhadap anggota dan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji kembali dan mengetahui lebih dalam bagaimana menyusun laporan keuangan khususnya pada koperasi yang benar dan sesuai dengan PSAK No. 27 serta peranan penerapan PSAK No. 27 bagi pengguna utama laporan keuangan KPRI Melati

Bangkalan) dengan cara menganalisis dan mengumpulkan data primer, yaitu data yang didapat dari objek penelitian secara langsung dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang ada kaitannya dengan penelitian.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi PSAK No. 27 dan peranannya bagi pengguna utama laporan keuangan pada KPRI Melati Bangkalan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis ketahui dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi PSAK No. 27 dan peranannya bagi pengguna utama laporan keuangan pada KPRI Melati Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagi Koperasi

Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi pimpinan koperasi dan dapat dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam meningkatkan perkembangan usaha sehingga tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai.

2. Bagi Penulis

Sebagai bahan perbandingan antara teori yang penulis dapatkan di bangku kuliah dengan praktika atau kenyataan yang sesungguhnya pada perusahaan, di samping itu juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis di masa yang akan datang khususnya mengenai PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi.

3. Bagi Universitas Trunojoyo

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan dan literature yang nantinya akan berguna sebagai bahan studi perbandingan bagi mahasiswa yang akan datang.